





VISI INTEGRITAS
LAW OFFICE

Korupsi, Politik dan PBJ

Oleh: Febri Diansyah

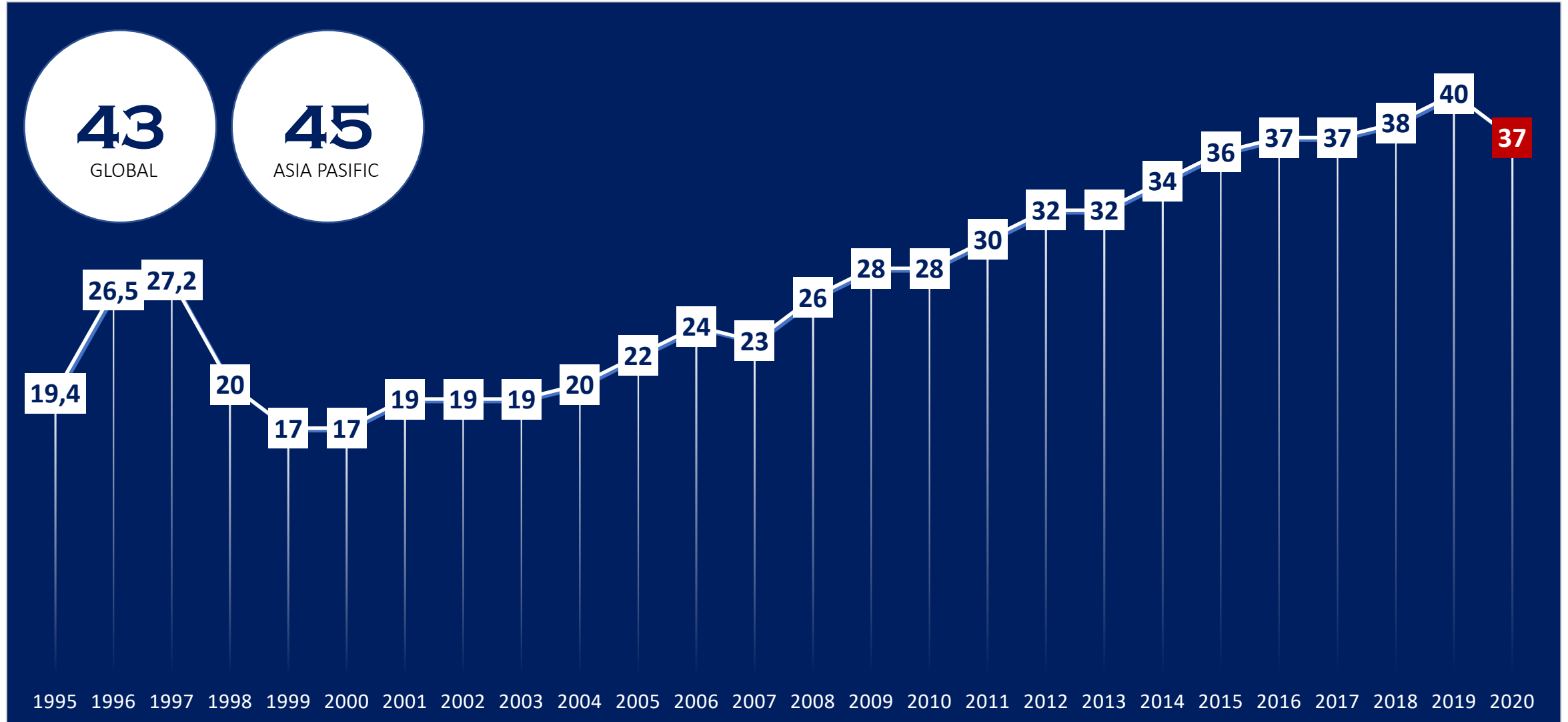
Disampaikan pada:

Sekolah Pengawasan dan Pemantauan Pengadaan Publik (SP3), TII

Juli–September 2021

www.visiintegritas.com

CPI INDONESIA 1995-2020



CPI Indonesia Tahun 2020

turun 3 poin dari 2019 – mundur 3 tahun

CPI SCORE

37

Economist Intelligence Unit/EIU (Country Risk Rating)

- Akuntabilitas dana publik
- Penyalahgunaan dana publik
- Pendanaan khusus yang tidak akuntabel
- Rekrutmen PNS
- Independensi badan audit
- Independensi peradilan
- Kebiasaan suap untuk kontrak

37

Bertlesmann Transformation Index

- Efektivitas pemidanaan tipikor pada pejabat publik
- Kesuksesan mengontrol korupsi dan efektivitas penegakan integritas

37

IMD World Competitiveness

Eksistensi suap dan korupsi

43

International Country Risk Guide

- Suap terkait ijin ekspor-impor, kontrol perdagangan, penghitungan pajak, perlindungan polisi, pinjaman
- Potensi atau korupsi aktual dalam bentuk kroni, nepotisme, pendanaan rahasia, kedekatan politik dan bisnis

50

World Justice Project

- Mengukur ketaatan satu negara dalam penegakan hukum (*rule of law*)
- Mengukur penyalahgunaan kewenangan publik pada: eksekutif, yudisial, polisi/militer dan legislatif

23

Global Insight (Country Risk Rating)

- Korupsi, dampaknya terhadap operasional bisnis (analisis penyebab politis & ekonomi)
- Asesmen pengalaman pebisnis dalam proses perjinan dan regulasi pendukung

35

World Economic Forum – Executive Opinion Survey

- Seberapa lazim perusahaan tidak mendokumentasikan suap terkait impor-ekspor, fasilitas publik, pembayaran pajak tahunan, kickback kontrak, memenangkan putusan pengadilan?
- Seberapa lazim dana publik dialihkan kepada swasta, individu atau kelompok terkait korupsi?

46

Varities Democracy Project (Baru masuk di 2017)

Mengukur 7 prinsip demokrasi suatu negara : *electoral, liberal, participatory, deliberative, egalitarian, majoritarian and consensual*

26

PERC Asia Risk Guide

- Persepsi korupsi sektor publik :
 1. Pimpinan politik nasional dan lokal
 2. PNS pusat dan daerah
- Persepsi Korupsi pada instansi tertentu: (Kepolisian, pengadilan, bea cukai, pajak, perijinan, pengawasan, militer)

32

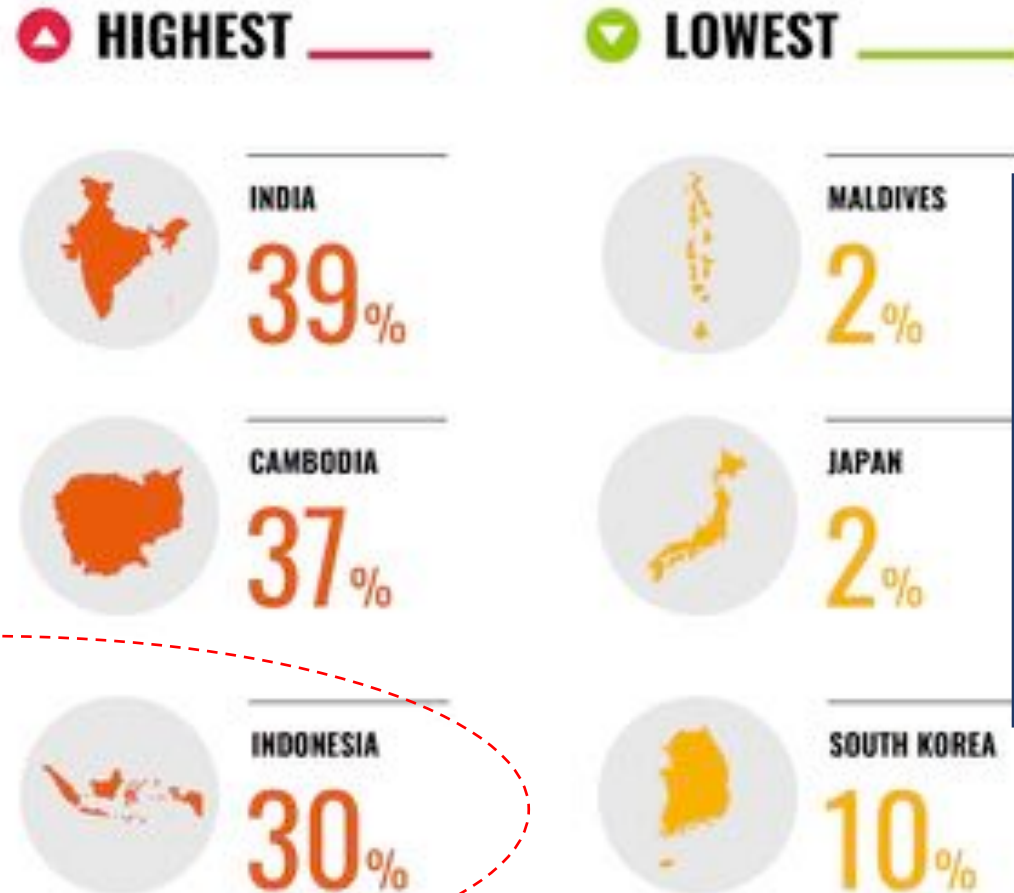
	2020	2019
PRS International Country Risk Guide	50 ↓	58
IMD World Competitiveness Yearbook	43 ↓	48
Global Insight Country Risk Ratings	35 ↓	47
World Economic Forum EOS	46 ←	46
Bertelsmann Foundation Transform Index	37 ←	37
Economist Intelligence Unit Country Ratings	37 ←	37
PERC Asia Risk Guide	32 ↓	35
Varieties of Democracy Project	26 ↓	28
World Justice Project – Rule of Law Index	23 ↑	21

1258
000
032
2

sumber: TI Indonesia, 2021

GLOBAL CORRUPTION BAROMETER 2020

#3



TINGKAT SUAP DI
INDONESIA NOMOR 3
DARI 17 NEGARA ASIA

VOTE-BUYING INDONESIA

92%

Think government corruption is a big problem

30%

Paid a bribe for public services in the previous 12 months*

36%

Used personal connections for public services in the previous 12 months*

26%

Offered bribes in exchange for votes

18%

Experienced sextortion or know someone who has

**Based on people who used these public services in the previous 12 months.*

**NOMOR: 2 (NEPOTISME)
SETELAH INDIA (46)**

RERATA ASIA: 14%



KLASIFIKASI KORUPSI

UU NOMOR 31 TAHUN 1999, DIUBAH UU 20 TAHUN 2001

1. Korupsi terkait kerugian keuangan negara
2. Suap menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan dan
7. gratifikasi

PERMA NO. 13 TAHUN 2016

tentang

**TATA CARA PENANGANAN PERKARA
TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI**

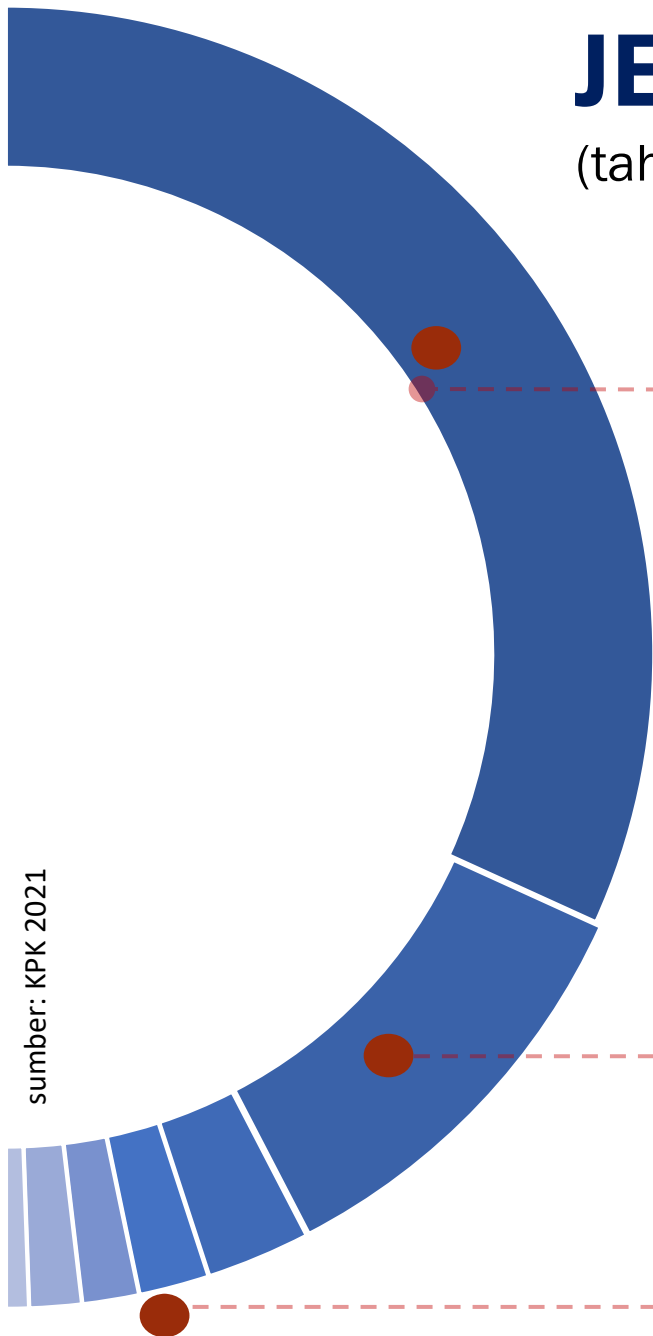
UU NO. 08 TAHUN 2010

tentang

**PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

JENIS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

(tahun 2004 s.d 2021)



739

SUAP



236

**PENGADAAN
BARANG & JASA**



50

PENYALAHGUNAAN ANGGARAN

38

TPPU

26

PUNGUTAN

23

PERIZINAN

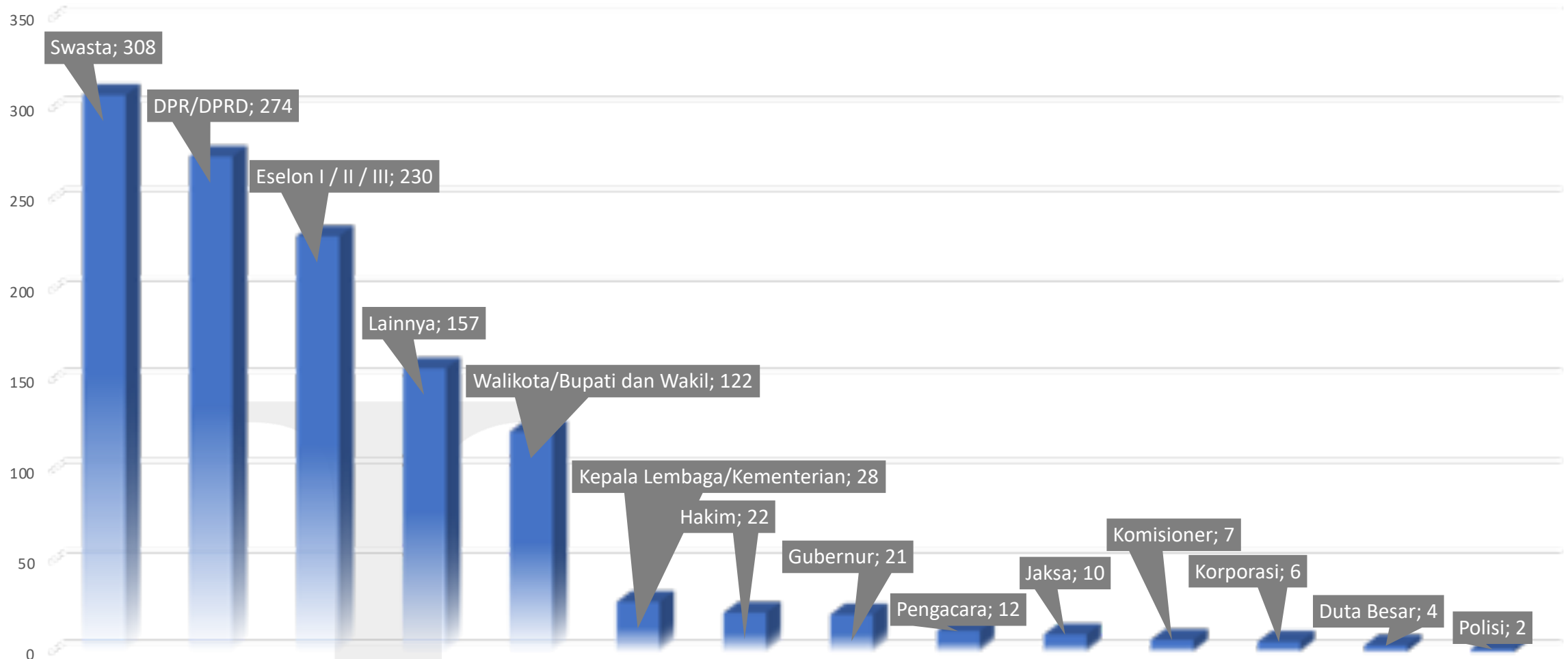
10

MERINTANGI PROSES KPK



JABATAN PELAKU KORUPSI

(tahun 2004 s.d 2021)



sumber: KPK, 2021

OTT KPK

2005 – JUNI 2021



417 POLITISI

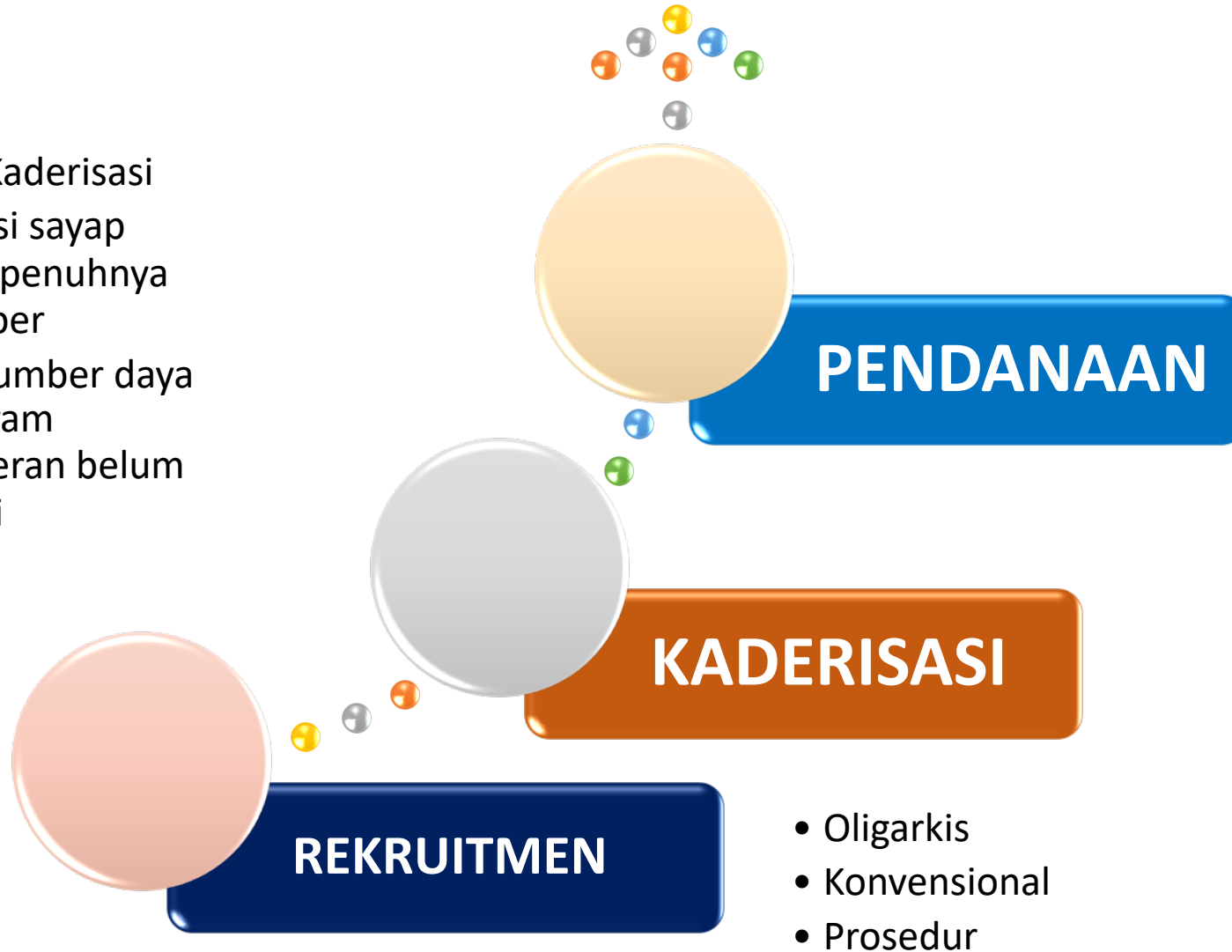


SUMBER: KPK, per 1 Januari 2021



AKAR MASALAH PARPOL

- Jenjang Kaderisasi
- Organisasi sayap belum sepenuhnya jadi sumber
- Alokasi sumber daya utk program pengkaderan belum memadai



- Oligarkis
- Konvensional
- Prosedur

- Sumber dana (sah) jauh lebih kecil dari belanja
- Bantuan APBN/D kecil
- akuntabilitas
- Keterbatasan audit BPK



KORUPSI
MERUGIKAN
KEUANGAN
NEGARA



GRATIFIKASI BIBIT KORUPSI

GRATIFIKASI

PEMBERIAN DALAM ARTI LUAS

- Penerima: Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara
- Berhubungan dengan Jabatan & Berlawanan dengan Kewajiban
- Berada pada 2 ranah: Pencegahan dan Penindakan

GRATIFIKASI

- Berhubungan dengan jabatan
- Bersifat liris (tidak dalam bentuk uang)
- Tidak menimbulkan kewajiban (transaksional)

Contoh: Perusahaan memberi hadiah voucher belanja kepada PNS karena kinerja terbaik dalam perusahaan per tahun



SUAP

- Dalam konteks pertemuan langsung pemodal dan pemerintah
- Komunikasi dilakukan secara tertutup

Contoh: Perusahaan membayar biaya ke pemerintah untuk mendapatkan proyek



PEMERASAN

- Adanya permintaan sepihak dari pejabat (pemerintah)
- Bersifat memaksa
- Penyalahgunaan kekuasaan

Contoh: Pejabat memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman jika tidak diberikan akan diabaikan dalam proses tender



GRATIFIKASI SUAP PEMERASAN



Dampak Korupsi dan Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi

DAMPAK SOSIAL KORUPSI TERHADAP PEREKONOMIAN

Berdampak
negatif terhadap
pertumbuhan
ekonomi

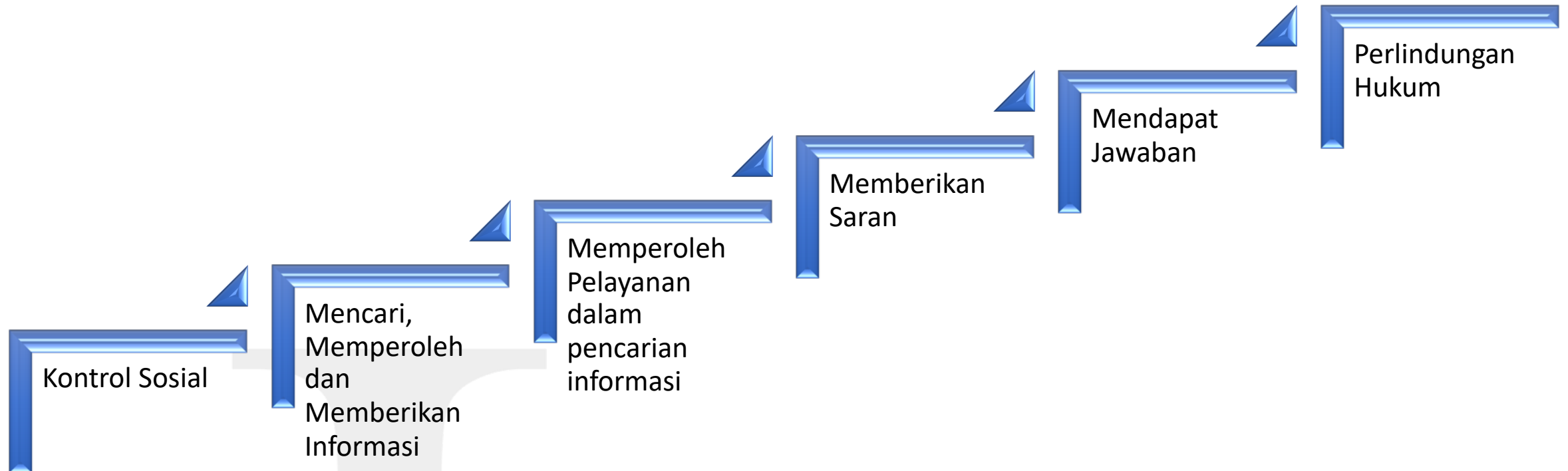
Menurunkan
Tingkat Investasi
Menambah
beban transaksi
ekonomi

Kualitas sarana
dan prasarana
publik yang
rendah

Menciptakan
Ketimpangan
Pendapatan

Meningkatkan
Kemiskinan

BENTUK PERAN SERTA MASYARAKAT



PERLINDUNGAN HUKUM

Dalam rangka
pelaksanaan hak

Jika diminta hadir dalam
proses Penyelidikan,
Penyidikan dan
Pemeriksaan di
Pengadilan sebagai
Pelapor, Saksi dan Ahli

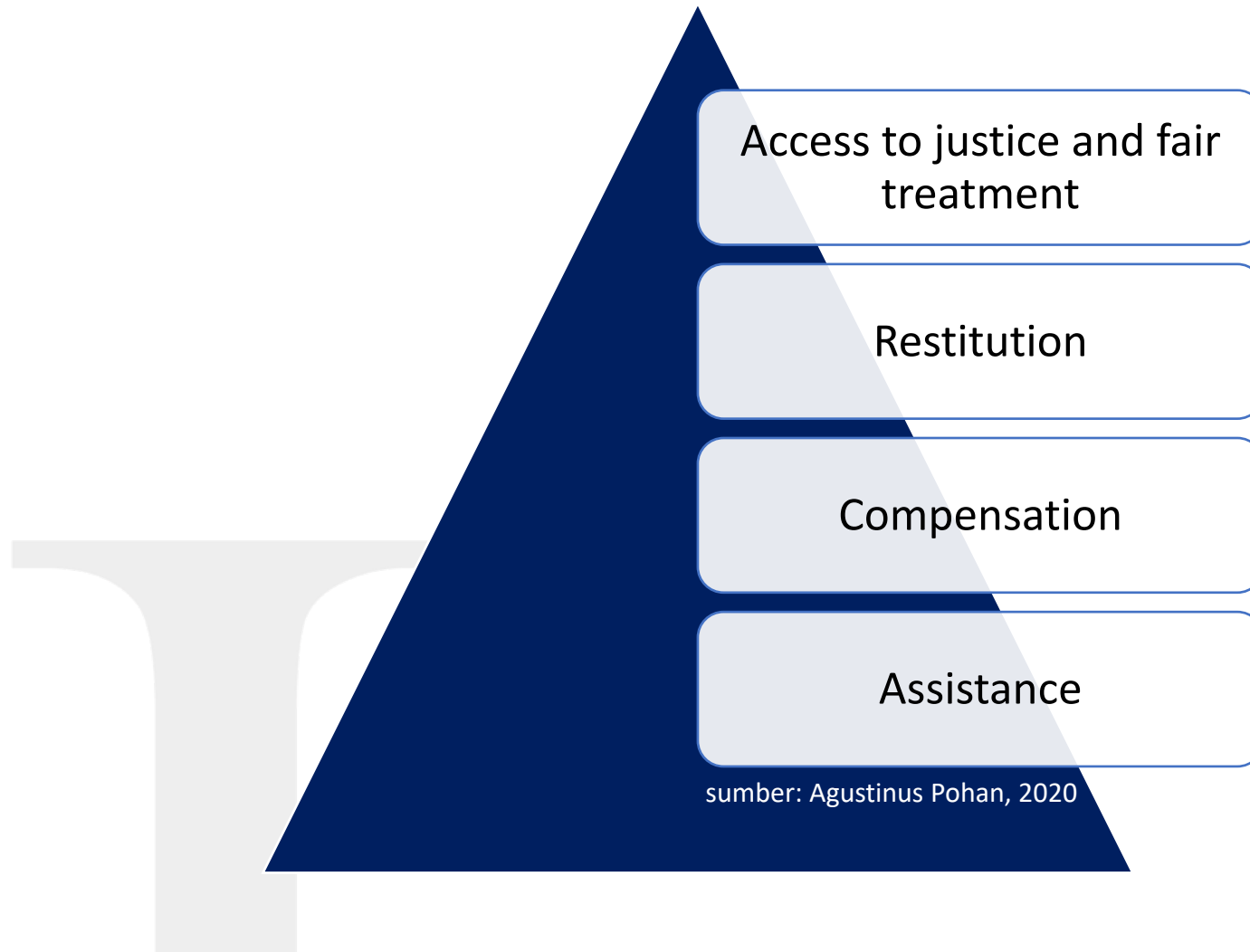
Tidak Dituntut
Perdata/Pidana atas
Laporan TPK

**BAGAIMANA DENGAN POSISI
MASYARAKAT SEBAGAI**

KORBAN

KORUPSI

HAK KORBAN TINDAK PIDANA



sumber: Agustinus Pohan, 2020

**TERIMA
KASIH**

Sahid Sudirman Center 11th
Floor Suite A, Jl Jenderal
Sudirman 86, Jakarta Pusat.
10220

www.visiintegritas.com

lawoffice@visiintegritas.com

Telp. 021.8063.1635/ Fax
021.8063.1632